

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan yang strategis dan dinamis dalam aspek ekonomi, militer dan politik. Oleh karena itu, kerja sama dan konstelasi politik internasional sering terjadi dan melibatkan negara di kawasan dan negara di luar kawasan karena letaknya yang cukup strategis (Syahbuddin, 2019, p. 1). Asia-Pasifik ialah wilayah yang mencakup Asia Tenggara, Asia Timur dan Australasia dekat dengan Laut Pasifik, dan negara-negara di laut Pasifik (Oceania). Dalam kawasan Asia Timur terdapat sebuah sub-wilayah Asia yang terdiri dari beberapa negara seperti Tiongkok, Mongolia, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, dan mempertemukan kekuatan negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika Serikat (AS) (Saputro, 2015).

Dalam konstelasi politik di kawasan Asia Timur diwarnai oleh beberapa dinamika yaitu Tiongkok-Taiwan, Korea Utara-Korea Selatan, India, AS dan Jepang. Salah satunya ialah dinamika hubungan Taiwan dan Tiongkok. Hubungan Taiwan dan Tiongkok ialah hubungan simetris dan subordinasi (Sudjatmiko, 2007, p. 1). Hal tersebut disebabkan oleh posisi Taiwan menginginkan kedaulatannya sendiri namun disisi lain Tiongkok berupaya untuk mempertahankan Taiwan sebagai suatu bagian dari Tiongkok. Dinamika hubungan Taiwan dan Tiongkok melibatkan negara *super power* AS (Sudjatmiko, 2010, p. 2).

Konflik Taiwan-Tiongkok berawal dari sejarah konflik antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang. Perbedaan ideologi antara PKT dan Kuomintang menyebabkan terjadinya perang saudara (*civil war*) di daratan Tiongkok. Perang saudara dimenangkan oleh kubu komunis Mao Zedong sehingga membuat Kuomintang beserta pengikutnya pindah ke Pulau Formosa, yang kemudian lebih dikenal dengan Taiwan (Yeung et al., 2022). PKT menang karena Mao Zedong mendapat dukungan dari Uni Soviet (Garcia, 2022). Kuomintang juga mendapatkan bantuan dari AS berupa evakuasi dalam pelariannya ke Formosa, meskipun berakhir dengan gencatan militer (Yin et al., 2023).

Di Taiwan, Kuomintang mendirikan pemerintahan sementara pada tanggal 8 desember 1949 dengan tetap menggunakan nama *Republic of China* atau (*ROC*), yang telah digunakan sebelum perang saudara di Tiongkok (F. J. Copper, 2015). Meskipun kalah perang, KMT tetap mempertahankan filosofi nasionalisme yang di gagas oleh Sun Yat Sen. Ia adalah bapak revolusi yang dijadikan presiden pertama oleh Taiwan. Disisi lain Mao Zedong, memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan menggantikan pemerintahan yang berdiri sejak tahun 1912 (BBC,2015).

Ketika awal berdirinya RRT, Mao menyatakan istilah *One China Policy* yang artinya ialah hanya satu pemerintahan berdaulat yaitu RRT. Adapun Taiwan dianggap sebagai bagian dari RRT, bukan negara yang terpisah (Wabiser, n.d., p. 20). Seluruh hubungan diplomatik dan kerja sama Taiwan harus melalui satu pemerintahan yaitu RRT. Negara-negara yang awalnya mengakui Taiwan

kemudian mengalihkan hubungan diplomatiknya ke RRT, termasuk AS. AS menormalisasi hubungannya dengan RRT yang ditandai dengan pertemuan antara Presiden Jimmy Carter dengan Deng Xiaoping selaku pemimpin RRT. Hal tersebut berdampak negatif terhadap Taiwan. Taiwan menjadi negara yang terisolasi dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur dan kehilangan kursinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Taiwan semakin tersudut dalam dunia internasional setelah Taiwan-Tiongkok menyetujui Konsensus 1992 (Pasya, 2022, p. 14).

AS juga memberikan bantuan kepada Taiwan selama perang dingin dengan mengirimkan *US volunteer group (Flying Tigers)* dan *US Naval Group Sino-America* untuk membendung invasi Jepang. Hal tersebut menjadi awal kedekatan antara AS dengan Taiwan. AS juga mengirimkan bantuan ke Taiwan untuk membendung pengaruh Komunis Tiongkok. Bantuan AS kepada Taiwan berupa armada ke-7, bantuan militer dan komando bantuan pertahanan. Kepentingan AS pada saat itu ialah kepentingannya di Asia Pasifik. (Syafiq, 2016, p. 46)

Hubungan AS-Taiwan dilandasi oleh pakta pertahanan bersama yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak dengan tujuan melindungi masyarakat (Taiwan) dari komunis dengan alasan menjaga perdamaian dunia. Setelah itu AS membuat suatu perjanjian *Mutual Defense Treaty (MDT)* dan *Militer AS Advisory Group (MAAG)* terhadap Taiwan yang berisi tidak hanya menjamin keamanan dan kelangsungan pemerintah Taiwan di Tiongkok, AS juga bertanggung jawab terhadap pertahanan Taiwan (Goldman, 2008).

Dukungan AS terhadap Taiwan dalam *six assurance* berupa bantuan

pertahanan militer seperti penjualan senjata. Penjualan senjata AS ke Taiwan tersebut sebenarnya telah mendatangkan protes dari Tiongkok, sehingga harus membawa AS dan Tiongkok untuk melakukan *Joint Communiqué* di tahun 1979 dalam *Joint Communiqué* tersebut, Tiongkok meminta agar AS menghentikan transfer senjata. Namun, seolah AS bersikap ambigu terhadap Tiongkok. Bukannya menghentikan suplai senjatanya justru AS melakukan kesepakatan *Taiwan Relations Act* (TRA).

Meskipun AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, AS memiliki hak untuk melakukan transaksi pertahanan dan militer berdasarkan TRA (Ger, 2015, p. 235). TRA adalah kebijakan AS untuk membangun hubungan dekat dan ekstensif dengan Taiwan. Pada dasarnya TRA tidak hanya berisi mengenai perjanjian pertahanan dan militer saja. TRA menjadi landasan utama komitmen AS dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan untuk Taiwan.

Perjanjian TRA mendapatkan respon negatif dari Tiongkok, Tiongkok mengkritik AS karena AS telah memberikan Taiwan bantuan senjata militer yang berlebih. Tiongkok menganggap TRA memiliki dampak merugikan bagi kelangsungan hubungan baik AS Tiongkok. Menyikapi pengesahan TRA, Tiongkok mempertanyakan komitmen AS dan menyampaikannya. Meski kesal, Beijing berusaha untuk tidak memperkeruh situasi dalam rangka menghindari potensi konflik terbuka (Tucker & Glaser, 2011, p. 122).

Penjualan senjata AS ke Taiwan dalam perkembangannya semakin memperkuat kapabilitas militer yang dimiliki oleh Taiwan. Faktor-faktor yang mendorong modernisasi militer Taiwan ialah yang ancaman dari Tiongkok, Sejak

berakhirnya Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949, Taiwan-Tiongkok tetap terlibat dalam perselisihan atas status kedaulatan Taiwan. Pemerintah Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang tidak akan dilepaskan. Kehadiran AS sebagai negara *super power* semakin menambah ketegangan hubungan lintas selat. Meskipun AS mengakui *One China Policy*, AS tetap melanjutkan hubungan diplomatik nya secara tidak resmi dengan Taiwan (Kan, 2003).

AS mempertahankan hubungan *de facto* yang cukup erat dengan Taiwan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Dalam bidang militer, AS merupakan penyuplai senjata terbesar bagi Taiwan dan membantu memodernisasi militer Taiwan. Hal tersebut memicu kekhawatiran Tiongkok, dimana Taiwan dapat melepaskan diri dari Tiongkok dikarenakan menguatnya kapabilitas militer Taiwan serta dukungan dari AS.

Asumsi tersebut yang melatarbelakangi Taiwan untuk meningkatkan anggarannya untuk pengembangan militer dalam jumlah yang cukup besar dan terus naik secara bertahap dari tahun ke tahun. Peningkatan kapabilitas militer ialah isu yang cukup sensitif dalam hubungan Internasional, karena berkaitan erat dengan isu pertahanan dan keamanan. Pemerintah Taiwan telah menggunakan teknologi canggihnya untuk memodernisasi militernya dengan mengembangkan sistem senjata, komunikasi, dan sistem intelijen yang lebih canggih (Lee, 2022).

Taiwan telah berinvestasi dalam bidang militernya. Pengeluaran militer tambahan sekitar T\$240 miliar (US\$8,20 miliar) yang disetujui tahun lalu selama lima tahun ke depan (Lee, 2022). Negara itu berencana untuk melipatgandakan

kapasitas produksi rudal tahunannya hingga mendekati 500 tahun ini, dengan 64% dari pengeluaran militer tambahan dihabiskan untuk senjata anti-kapal seperti sistem rudal darat. Taiwan juga telah memperkuat kemampuan asimetrisnya dengan berinvestasi pada ranjau laut angkatan laut atau rudal anti kapal berbasis pantai.

Menurut Walter S. Jones dalam pertahanan nasional merupakan fokus utama bagi setiap negara. Selanjutnya hal ini berbanding lurus dengan rasa integritas yang dimiliki negara. Sehingga menjadi wajar ketika satu wilayah merasa terancam, maka perhatian atas pertahanan nasionalnya akan semakin lebih besar pula sehingga mendorong dilakukan upaya-upaya defensif terhadap ancamannya. Sekiranya hal itulah yang dirasakan oleh Taiwan dalam menanggapi keinginan reunifikasi yang hingga saat ini masih senantiasa disuarakan oleh Tiongkok (Castillo et al., 2001).

Di era George W. Bush, AS melakukan transfer senjata ke Taiwan mencapai US \$ 7,2 miliar selama periode tahun 1996-1999 dan US \$ 4,5 miliar ditahun 2000-2003 yang menjadi peringkat pertama pengimpor senjata di Asia. Taiwan menerima pengiriman senjata selama periode delapan tahun dari tahun 1996 hingga 2003 senilai US \$ 19,4 miliar dan Taiwan menempati peringkat kedua setelah Arab Saudi diantara pengimpor lainnya di dunia. Pada tahun 2010, pemerintah Presiden Barack Obama menyetujui paket dan memberitahu rencana ini kepada Kongres yang akan menjual senjata senilai 6,4 miliar dolar (Azizah, n.d.). Pada Pemerintahan Obama memblokode penjualan senjata senilai \$1 miliar ke Taiwan pada tahun 2016 (Armandhanu, 2015).

Berdasarkan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. *Pertama*, sejauh mana AS memberikan bantuan terhadap Taiwan. *Kedua*, adanya protes dan sanksi oleh Tiongkok terhadap perusahaan AS yang melakukan transfer pasokan senjata. Setelah AS memberikan bantuan terhadap Taiwan, bagaimana dampak hubungan lintas selat tersebut. *Keempat*, Presiden Trump memberikan ucapan selamat terhadap terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dalam pemilihannya.

Peneliti tertarik untuk membahas tentang dinamika hubungan Taiwan-Tiongkok karena hubungan kedua negara yang cukup kompleks. Politik luar negeri yang dilakukan Taiwan yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara lain serta kebijakan *One China Policy* yang membatasi hubungan diplomatik Taiwan. Taiwan yang terus mendapatkan bantuan militer dalam kerja sama pertahanan dari AS pada tahun 2016-2020, menimbulkan respon negatif dari Tiongkok bahkan memicu ketidakstabilan di kawasan Indo-Pasifik. Urgensi dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi sejauh apa bantuan AS terhadap Taiwan dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika hubungan lintas selat. Bagaimana kebijakan TRA perlu di review kembali karena menimbulkan ketidak harmonisan hubungan lintas selat serta ancaman konflik di kawasan regional.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan tersebut, penulis menentukan dan mengemukakan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana dampak

dukungan Amerika Serikat terkait modernisasi militer Taiwan terhadap dinamika hubungan Taiwan dan Tiongkok 2016-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dampak dukungan Amerika Serikat terkait modernisasi militer Taiwan terhadap dinamika hubungan Taiwan dan Tiongkok 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain;

1. Menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari dampak dukungan Amerika Serikat terkait modernisasi militer Taiwan terhadap dinamika hubungan Taiwan-Tiongkok.
2. Membantu menganalisis fenomena terkait struktur sistem internasional yang mempengaruhi perilaku negara dalam lingkup hubungan internasional dengan konsep Kebijakan pertahanan, *balance of power*, *security dilemma* dan teori Neorealisme dari hubungan segitiga AS, Taiwan dan Tiongkok.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang penulis harapkan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Menjadi sumber literatur bagi peneliti lainnya dengan tema serupa di masa mendatang.
2. Menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan Indonesia untuk menjaga sikap netral dalam hubungannya dengan Taiwan dan Tiongkok serta mempertimbangkan potensi dampak dukungan AS terhadap stabilitas dan keamanan kawasan untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun agar dapat menjelaskan kerangka pemikiran dengan menggunakan metodologi penelitian. Hal tersebut terdiri dari alasan penulis mengambil permasalahan dan dinilai signifikan untuk diangkat sebagai masalah yang perlu diteliti dan digali lebih dalam sebagai bahan kajian ilmiah.

BAB I PENDAHULUAN. Bagian tersebut berisi atas kerangka permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis, serta penataan penyusunan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bagian tersebut berisi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan masalah agar dapat dianalisis sehingga mampu menghasilkan sebuah jawaban dan membantu dalam bab pembahasan berikutnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pada bab ini peneliti menguraikan metodologi penelitian yang ditempuh oleh Peneliti. Metodologi pada penelitian tersebut mencakup paradigma penelitian yang penulis gunakan sebagai sudut pandang dalam melihat masalah, pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dari permasalahan dengan menggunakan konsep-konsep terkait, lalu hasil penelitian pada sub-bab 4.1. dan pada 4.2 menguraikan pembahasan analisis teori pada hasil penelitian yang sudah di dapatkan.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi uraian secara singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah serta saran secara teoritis dan praktis.

